
Indikator Kinerja Utama Program Bantuan Sosial Pangan di Indonesia: Analisis Faktor Konfirmatori

¹Istiana Hermawati, ²Ikhsanudin, ³Safa'at Ariful Hudha, ⁴Risnandar

¹STPMD APMD Yogyakarta, Indonesia

² Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

³LPPM Bina Insan Mandiri Yogyakarta, Indonesia

⁴Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial Republik Indonesia

¹istiana1410@gmail.com, HP (+6285228716070)

ikhsanudin@untirta.ac.id, HP (+6285725331330)

³safaat.a.huda@gmail.com, HP (+6285649894591)

⁴aaboritz@gmail.com, HP (858-7841-4691)

Abstract

Poverty and limited access to welfare make it difficult for most poor people in Indonesia to meet their basic needs, especially food needs. One of many efforts made by government, especially in the Ministry of Social Affairs to overcome the problem of poverty and improve people's food security, is through a social welfare program namely Non-Cash Food Assistance (BPNT). This study aims at finding the empirical evidence for the measurement of the key performance indicators of the BPNT in Indonesia. This study is a quantitative approach involving 1530 subject respondents, consisting of beneficiary families, program assistants, and stakeholders from 34 cities/districts. Samples were determined by a multistage sampling in randomized. A questionnaire was used to collecting the data. Collected data were analyzed confirmatory factor analysis using Lisrel 8.50. Fitness of the measurement construct is determined based on nine criteria of fitness. The results prove that the construct for measuring the performance of the BPNT in Indonesia is formed by seven indicators, namely right target, right quantity, right price, right administration, right time, right quality, and right benefits (abbreviated as 7R). The test results prove, that all the criteria for the fit of the model are met. This means the performance of BPNT program could be measured using these seven aspects so that it can be known how well the process of the food welfare program in the field is. This evidence of measurement construct is also a form of instrument validation which can then be recommended for use in future BPNT program evaluation activities.

Keywords: confirmatory factor analysis, non-cash food assistance, key performance indicators, measurement constructs.

Abstrak

Kemiskinan dan terbatasnya akses terhadap kesejahteraan menyulitkan sebagian besar masyarakat miskin Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama kebutuhan pangan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Sosial untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, adalah melalui program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Tujuan penelitian ini untuk menemukan bukti empiris terkait pengukuran konstruk kinerja utama program BPNT. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bersifat evaluatif. Sampel penelitian sejumlah 1530 responden, terdiri dari keluarga penerima manfaat, asisten program, dan stakeholder dari 34 kota/kabupaten. Sampel ditentukan menggunakan teknik acak multilevel. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner. Dari data yang terkumpul, dilakukan analisis faktor konfirmatori berbantuan program Lisrel 8.50. Kecocokan konstruk pengukuran ditentukan berdasarkan sembilan kriteria goodness of fit index. Hasil penelitian membuktikan bahwa konstruk pengukuran kinerja program BPNT di Indonesia terbentuk oleh tujuh indikator yaitu (1) tepat sasaran, (2) tepat kuantitas, (3) tepat harga, (4) tepat waktu, (5) tepat kualitas, (6) tepat administrasi,

dan (7) tepat manfaat (disingkat 7T). Hasil uji membuktikan bahwa semua kriteria untuk fit model terpenuhi. Ini berarti, bahwa kinerja program BPNT dapat diukur dengan menggunakan tujuh aspek tersebut sehingga dapat diketahui seberapa baik pelaksanaan program bantuan pangan di lapangan. Bukti dari kontrak pengukuran ini juga merupakan bentuk validasi instrumen yang kemudian dapat direkomendasikan untuk digunakan dalam kegiatan evaluasi program BPNT di masa mendatang.

Kata kunci: analisis faktor konfirmatori, bantuan pangan non tunai, indikator kinerja utama, konstruk pengukuran.

PENDAHULUAN

Permasalahan gizi merupakan isu global yang dialami oleh seluruh negara. Di Indonesia persentase penduduk dengan gizi buruk dan gizi kurang menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018 sebesar 17,7%. Kurangnya pemenuhan terhadap kebutuhan gizi ini menyebabkan masalah kelaparan dan *stunting*, yang berimbas pada rendahnya kualitas hidup manusia. Oleh sebab itu, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat menjadi salah satu program strategis Pemerintah Indonesia dalam rangka mencapai ketahanan pangan.

Ketahanan pangan dimaknai sebagai kondisi di mana setiap saat semua penduduk mempunyai jangkauan makanan yang mencukupi dan bergizi secara fisik, sosial, dan ekonomi untuk kelangsungan

hidup sehat dan aktif (FAO, 2009; Palmer & Groppo, 2002). Badan Ketahanan Pangan RI (2013) menyampaikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi kebutuhan pangan yang terpenuhi bagi keluarga terganbar oleh kecukupan makanan dengan jumlah dan mutu yang baik, aman, merata, halal, dan terjangkau. Dengan demikian, ketahanan pangan rumah tangga dapat dimaknai sebagai kapabilitas keluarga untuk mencukupi kebutuhan pangan semua anggota keluarga secara penuh baik kuantitas maupun mutu gizinya (Mardisantosa, Bambang; Huri, Daman; Edmaningsih, 2018).

Ketahanan pangan seringkali dipandang sebagai isu krusial di dunia. Masalah ini diuraikan pada dokumen *Millennium Development Goals* (MDGs) dan *Sustainable Development Goals*

(SDGs). Masalah pangan terjadi di berbagai negara mulai dari negara miskin hingga di negara maju (Conceição et al., 2016). Di negara berkembang, kebutuhan pangan dialokasikan lebih besar dari setengah penghasilan keluarga. Pada kasus ini, keadaan menjadi rawan apabila terjadi lonjakan harga secara mendadak sehingga beberapa orang menjadi miskin dan sulit memenuhi kebutuhan pangannya (Ivanic & Martin, 2008). Pemberantasan kemiskinan sangat erat dengan 17 tujuan global lainnya yang tercantum dalam SDGs, yakni penduduk bebas dari kelaparan, pendidikan berkualitas, dan sebagainya. Dalam hal ini disampaikan juga bahwa relasi antar komponen penting dalam mewujudkan seluruh tujuan tersebut (Ishartono & Raharjo, 2019).

Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan poin kedua dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's), yakni *Zero Hunger* atau dengan bahasa lain tiada rakyat kelaparan (HAM, 2012). Ini berarti, pengentasan kelaparan, pemenuhan

kebutuhan gizi serta upaya mencapai ketahanan pangan menjadi tujuan bersama secara global. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia memprioritaskan ketahanan pangan melalui kebijakan nasional, diantaranya melalui kesepakatan tingkat internasional, yaitu: *Sustainable Development Goals (SDGs)*, *World Food Summit*, dan *Rome Declaration on World Food Security* (Anonim, 1996) (Kementerian PPN/ Bappenas, 2017). Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah di bidang ketahanan pangan nasional adalah melalui program BPNT bagi penduduk miskin atau kurang sejahtera di Indonesia (Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017; B2P3KS, 2018; Permensos RI Nomor 11 Tahun 2018).

Menurut BPS, salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk nampak pada tingkat kecukupan gizi terdiri dari konsumsi kalori dan protein (The Central Statistic Agency, 2020). Keluarga miskin di Indonesia diukur berdasarkan kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok. Dalam

ukuran tersebut, penduduk miskin diartikan sebagai penduduk yang tidak mampu secara ekonomi dalam pemenuhan makanan sebagai kebutuhan pokok. Jadi, keluarga miskin merupakan keluarga dengan rerata pengeluaran per kapita setiap bulan lebih rendah dari garis kemiskinan. Dari data BPS nampak bahwa Garis Kemiskinan Makanan (GKM) turut berkontribusi dalam formasi garis kemiskinan sebesar Rp. 324.911 atau 73,75 persen pada bulan September 2019 (Central Statistics Agency, 2020).

Terkait data kemiskinan di negara Indonesia, informasi dari BPS menunjukkan bahwa masyarakat miskin pada laporan September 2019 sebanyak 9,22 persen, turun 0,44 persen daripada September 2018. Persentase jumlah penduduk tersebut adalah persentase paling rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. BPS melaporkan bahwa ada perbaikan penghasilan secara lebih merata pada kurun masa tersebut. Hal ini ditandai oleh adanya penurunan indeks perkotaan

sebesar 6,56 persen dan pedesaan sebesar 12,60 persen. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada laporan September 2019 diketahui sebanyak 9,22 persen yang setara dengan 24,79 juta jiwa. Tingkat kemiskinan turun dari kondisi Maret 2019 yakni 9,41 persen (The Central Statistic Agency, 2020).

Beberapa program Kementerian Sosial dianggap memberikan pengaruh signifikan pada pengentasan kemiskinan di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah bantuan pangan untuk penduduk miskin. Bantuan ini memiliki tujuan mengurangi biaya pengeluaran penduduk miskin serta rentan dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Hal ini menjadi bentuk perlindungan sosial masyarakat dalam aspek pangan yang diberikan pemerintah (dalam konteks ini Kemensos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang meliputi penduduk penghasilan rendah, miskin, dan rentan (PMK, 2019). Dengan demikian, bantuan yang diberikan diharapkan dapat mengatasi persoalan

pangan masyarakat di tengah ketidakpastian perekonomian global saat ini.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program bantuan yang disalurkan melalui keuangan elektronik kepada masyarakat sasaran yang dapat dicairkan per bulan untuk membeli bahan pangan yang ditentukan yakni beras dan telur. BPNT ini adalah salah satu kebijakan penting dari Pemerintah Indonesia dalam mengatasi kemiskinan masyarakat khususnya yang memiliki pendapatan rendah yang menjadi penerima manfaat. Program BPNT ditujukan untuk memungkinkan penerima manfaat memperoleh bahan makanan yang lebih bergizi dan meningkatkan kualitas pangan mereka (Zhou & Hendriks, 2017). Meskipun konsep bantuan pangan dalam berbagai literasi masih diperdebatkan, namun program bantuan pangan secara umum merupakan sebuah inisiatif untuk menyediakan bahan pangan dan peningkatan kualitas gizi yang dilakukan

dengan berbagai program pemerintah dan diperuntukkan bagi masyarakat yang tergolong dalam keluarga miskin (Hebinck et al., 2018). Program bantuan pangan merupakan dasar bantuan kemanusiaan, tetapi juga merupakan intervensi untuk mengatasi kerentanan dan kerawanan pangan bagi keluarga yang tergolong kurang dalam pemenuhan nutrisi dan kebutuhan pangan dasar lainnya (Waity, 2019; Zhou & Hendriks, 2017).

Penyerahan bantuan melalui akun elektronik (non tunai) diarahkan agar terjadi peningkatan efektivitas dan kesesuaian target bantuan, ketepatan jumlah dan ketepatan waktu serta mendorong keuangan yang inklusif. Dengan adanya BPNT, besar harapan bisa menyajikan keleluasaan bagi masyarakat penerima bantuan untuk memilih jenis, mutu, harga, serta lokasi pembelian bahan makanan. Besaran BPNT ditentukan senilai Rp 110.000,- per bulan. BPNT dan dapat dialokasikan untuk membeli bahan pangan berupa beras dan telur dengan kuantitas dan

mutu ditentukan sendiri oleh penerima bantuan. Dengan kata lain, BPNT adalah bagian dari sistem ketahanan pangan nasional yang diselenggarakan untuk mendukung kemandirian dan kedaulatan pangan.

Kementerian Sosial sebagai penyelenggara program kesejahteraan sosial di Indonesia ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan melalui BPNT yang disampaikan kepada penerima manfaat dengan prinsip 7T: tepat sasaran, tepat jumlah, , tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga, tepat administrasi, dan tepat manfaat. Prinsip tersebut dimaksudkan untuk memenuhi nilai relevan dengan tujuan program yang kemudian harus dihitung, dianalisis dan dievaluasi untuk memungkinkan keadaan dan kelangsungan kesejahteraan bagi penerima manfaat program (Lavy, S., & Dixit, 2017; Lavy et al., 2014). Ketujuh prinsip ketepatan pada program BPNT digunakan oleh pemerintah untuk menunjukkan tingkat keberhasilan, meningkatkan program dan layanan serta

memberikan dasar pengambilan keputusan berdasar informasi yang telah diperoleh guna meningkatkan kualitas program selanjutnya (Chan, 2015). Dengan demikian 7T ini merupakan kinerja utama program BPNT.

Kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan melalui program BPNT perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah pelaksanaan program tersebut berhasil atau telah sesuai dengan tujuh prinsip di atas. Evaluasi adalah suatu kegiatan pengumpulan dan analisis data tentang ketercapaian tujuan (efektifitas) dan dampak dari suatu program. Worthen, B. R., & Sanders (1987) mendeskripsikan pengertian evaluasi sebagai jalan mencari informasi yang berharga mengenai suatu program, produksi, serta prosedur tertentu. Lebih lanjut, Sanders, Fitzpatrick, dan Worthen (2011) mengartikan evaluasi sebagai kegiatan identifikasi, klarifikasi dan implementasi kriteria guna memberikan nilai mutu suatu objek

evaluasi dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

Inti dari evaluasi yang dimaksud adalah proses dihasilkannya informasi sebagai pilihan keputusan (D.L. Stufflebeam, 1985; Stake, 1967). Frye dan Hemmer (2012) menjelaskan evaluasi program dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai sumber variasi dalam hasil program dari dalam dan luar program. Dengan demikian, dapat dikatakan evaluasi adalah suatu proses pengumpulan data atau informasi terkait program yang sudah ditetapkan dan informasi tersebut dapat digunakan oleh pihak terkait untuk mengambil keputusan terkait keberlangsungan program berikutnya.

Pengujian evaluatif terhadap indikator kinerja utama (*key performance indicators*) selain dilakukan secara deskriptif juga dilakukan pengujian secara inferensial dengan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)*. Dalam CFA, beberapa alternatif model dapat dipilih atau dibangun sesuai kondisi konseptual yang diharapkan

dari berbagai referensi (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1995; Jöreskog & Sörbom, 1993). Menurut Joreskog dan Sorborn (1993) CFA berguna untuk uji satu dimensi, uji validitas dan reliabilitas suatu variabel yang tidak bisa diamati secara langsung pada konstruk tertentu. Ferdinand (2002) menyebutkan pada CFA, model disebut juga sebagai model deskriptif atau model factor konfirmatori. Pada model ini, kondisi empiris variabel laten terbagi menjadi beberapa indikator konstruk yang menjadi susunan ukuran variabel tersebut. Rumusan persamaan biasa digambarkan dalam bentuk began atau diagram (Kusnendi, 2008).

Secara apriori, CFA dilakukan berdasar konsep atau teori yang mendasar. Teori yang dimaksud telah ada sebelumnya (Opperman et al., 2013). Analisis faktor konfirmatori biasanya didasarkan pada teori pengukuran yang dikembangkan dengan baik untuk menyesuaikan konstruk yang akan diukur (Alex Linley et al., 2007; Kline, 2015). Dalam CFA, penyusunan

faktor dilakukan secara sengaja dan dirumuskan dengan dasar teori atau konsep yang ada. Pada hakikatnya, CFA digunakan dalam pembuktian adanya keterkaitan antar variabel dengan melakukan uji korelasi berulang dan uji validitas serta reliabilitasnya. Tujuan lain dari analisis faktor konfirmatori adalah untuk menguji kalayakan model pengukuran (Lewis, 2017). CFA memberikan informasi yang berguna tentang dimensi skala dan bukti validitas, pengukuran yang valid sangat penting sebagai bukti empiris dalam sebuah penelitian (Levine, 2005).

METODE

Penelitian ini berjenis deskriptif kuantitatif yang bersifat evaluatif, dilaksanakan pada Juni-Agustus 2018 di 34 kota/kabupaten di Indonesia. Penentuan sampel menggunakan teknik *sampling* acak multilevel (Sedgwick, 2015) sebanyak 1530 responden yang terdiri dari penerima manfaat, pendamping program, dan *stakeholder*. Pengumpulan data melibatkan tim peneliti dari Kementerian Sosial dan

peneliti dari beberapa perguruan tinggi serta enumerator lokal. Data dikumpulkan melalui pengisian kuesioner yang dikembangkan dari indikator kinerja utama BPNT.

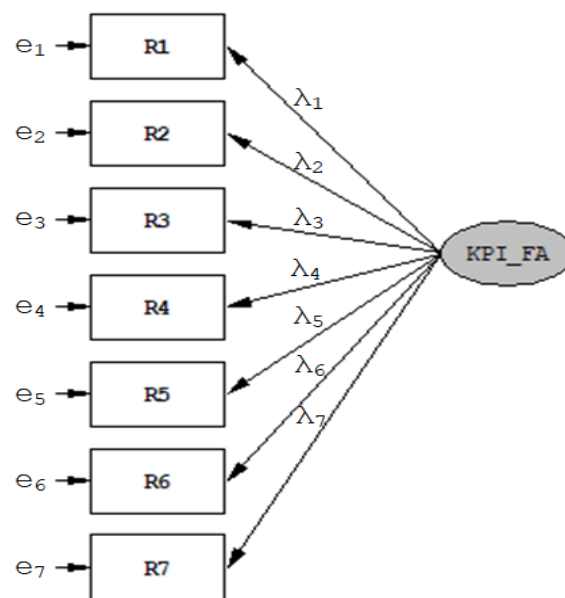
Instrumen (kuesioner) terdiri dari tujuh indikator dengan rincian indikator kinerja utama BPNT. Masing-masing indikator secara berurutan tersusun dari: tepat sasaran (tiga item), tepat jumlah (tiga item), tepat harga (lima item), tepat kualitas (lima item), tepat waktu (lima item), tepat administrasi (tiga item), dan tepat manfaat (delapan item). Pemberian skor pada setiap item dilakukan menggunakan skala Guttman, jika tepat maka mendapatkan skor 1 dan sebaliknya jika tidak tepat mendapatkan skor 0.

Setiap indikator pada instrumen kajian ini memiliki nilai yang didapatkan dari penjumlahan skor pada setiap item dalam indikator yang sama. Analisis data menggunakan CFA berbantuan program Lisrel 8.50. Hasil olah data disajikan dalam bentuk model pengukuran konstruk

indikator kinerja utama dan ditampilkan dalam bentuk tabel *goodness of fit* yang berisi kriteria kecocokan model. Kategori *goodness of fit* sebagai kriteria uji adalah *Chi Square* ($\chi^2 \leq \chi^2$ kritik) dan *Probability* ($p < 0,05$), *Root Mean Square Error of Approximation* ($RMSEA \leq 0,08$), *Comparative Fit Index* ($CFI \geq 0,90$), *Goodness of Fit Index* ($GFI \geq 0,90$), *Normed Fit Index* ($NFI \geq 0,90$), *Relative Fit Index* ($RFI \geq 0,90$), *Non Normed Fit Index* ($NNFI \geq 0,90$), *Incremental Fit Index* ($IFI \geq$

$0,90$), dan *Adjusted Goodness of Fit Index* ($AGFI \geq 0,90$).

Key Performance Indicators program BPNT dalam konteks penelitian ini dapat dikemukakan sebuah konsep, bahwa keberhasilan program BPNT akan tercipta apabila program tersebut tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat administrasi, dan tepat manfaat. Apabila disederhanakan dalam sebuah ilustrasi akan terlihat sebagaimana gambar berikut.



Gambar 1. Model Pengukuran Key Performance Indicators Program BPNT

Notes:

R1 = tepat sasaran; R2 = tepat jumlah; R3 = tepat harga; R4 = tepat kualitas; R5 = tepat waktu; R6 = tepat administrasi; R7 = tepat manfaat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum responden penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: mayoritas (97,56%) berjenis kelamin perempuan, berusia 30-49 tahun (75,92%), berstatus kawin (85%), berpendidikan rendah (tidak tamat SD hingga tamat SD sebanyak 66,96%), bekerja sebagai ibu rumah tangga (68,53%), memiliki anak antara 1-3 orang (73,33%), memiliki tanggungan keluarga sebanyak 4-6 jiwa (72,33%), memiliki penghasilan rata-rata Rp. 1.262.224,- per bulan dan pengeluaran rata-rata sebesar Rp. 947.063,- per bulan. Apabila batas kemiskinan ditetapkan BPS (Susenas, Maret 2018) senilai Rp. 401.220,- /kapita/bulan, berdasar asumsi tanggungan keluarga 4 orang, maka rumah tangga dengan pengeluaran setiap bulan kurang dari Rp. 1.604.880,- maka dikategorikan miskin. Dari perhitungan ini dapat disimpulkan, bahwa mayoritas KPM BPNT memiliki kehidupan di bawah garis kemiskinan nasional.

Fakta bahwa mayoritas penerima manfaat BPNT adalah penduduk di bawah garis kemiskinan nasional ini relevan dengan pendapat (Hebinck et al., 2018; Waity, 2019; Zhou & Hendriks, 2017) yang menyatakan, bahwa bantuan pangan merupakan bantuan kemanusiaan dan diperuntukkan bagi masyarakat yang tergolong dalam keluarga miskin. Program bantuan pangan ini merupakan intervensi dari pemerintah untuk mengatasi kerentanan dan kerawanan pangan bagi keluarga yang tergolong kurang dalam pemenuhan nutrisi dan kebutuhan pangan dasar lainnya. Program ini memungkinkan keluarga miskin untuk memperoleh bahan makanan yang lebih bergizi dan dapat meningkatkan kualitas pangan mereka sebagaimana disampaikan Zhou & Hendriks (2017).

Pengujian konstruk indikator kinerja utama (*Key Performance Indicator*) program BPNT melibatkan 1530 responden dari 34 kota/kabupaten di Indonesia. Pengujian konstruk dilakukan

dengan menguji kesesuaian model dengan data empirik menggunakan teknik *Confirmatory Factor Analysis model (CFA model)*. Pada kajian ini, variabel laten yang diteliti terdiri dari tujuh komponen yaitu *dimensi sasaran, harga, jumlah, waktu, kualitas, administrasi dan manfaat*.

Berdasarkan hasil analisis konstruk yang dilakukan dengan menggunakan sembilan *Goodness of Fit* sebagai parameter kecocokan model yang ditampilkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Goodness of Fit Indikator Kinerja Utama Program Bantuan Pangan Non Tunai

No	Index	Hasil	Batas Nilai	Tingkat Kecocokan
1	<i>Chi Square (χ^2) dan Probability (p)</i>	6,05 $P=0,109$	$\leq \chi^2$ kritik $P>0,05$	<i>Fit</i>
2	<i>Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)</i>	0,026	$\leq 0,08$	<i>Fit</i>
3	<i>Normed Fit Index (NFI)</i>	1,00	$\geq 0,90$	<i>Fit</i>
4	<i>Non Normed Fit Index (NNFI)</i>	0,99	$\geq 0,90$	<i>Fit</i>
5	<i>Comparative Fit Index (CFI)</i>	1,00	$\geq 0,90$	<i>Fit</i>
6	<i>Incremental Fit Index (IFI)</i>	1,00	$\geq 0,90$	<i>Fit</i>
7	<i>Relative Fit Index (RFI)</i>	0,98	$\geq 0,90$	<i>Fit</i>
8	<i>Goodness of Fit Index (GFI)</i>	1,00	$\geq 0,90$	<i>Fit</i>
9	<i>Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)</i>	0,99	$\geq 0,90$	<i>Fit</i>

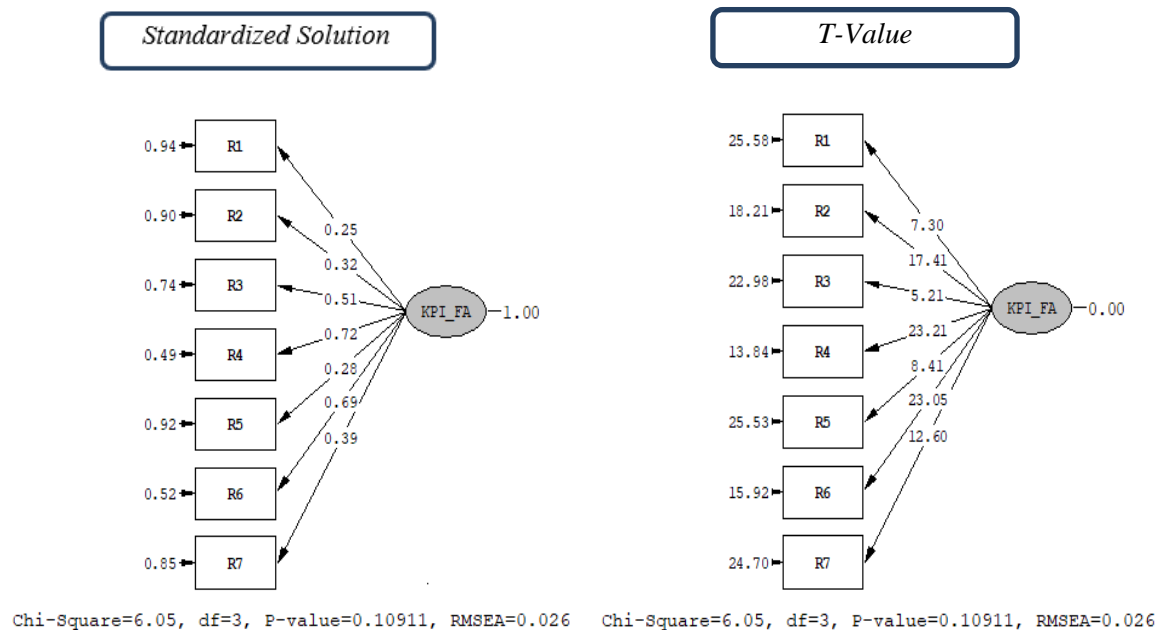
Sumber: Analisis Data Primer

Berdasar Tabel 1, diketahui semua kriteria menjadi parameter kecocokan (*goodness of fit*) terbukti memenuhi kriteria. Nilai hasil analisis faktor konfirmasi pada kriteria *Chi Square (χ^2)* diperoleh angka sebesar 6.05, atau lebih kecil dari nilai χ^2 kritik (≤ 7.81). Kriteria tersebut menjelaskan, bahwa model teori

yang digunakan sebagai prinsip ketepatan fit dengan data yang diperoleh sesuai dengan signifikasi statistik *Chi Square* (Linley: 2007). Nilai pada *RMSEA* menunjukkan pada angka 0.026 ($\leq 0,08$). Hal tersebut mengindikasikan bahwa model yang disusun fit berdasarkan atas hasil dari nilai residu yang terdapat di dalam model. Selanjutnya pada ketujuh kriteria fit model

memperoleh nilai rata-rata yang sempurna dimana empat diantaranya memperoleh nilai sempurna (1.00) sedangkan tiga yang lainnya memperoleh angka sebesar 0.98 dan 0.99. Dengan demikian, model yang dianalisis mendapat dukungan kuat secara empiris dari sampel penelitian. Maknanya, model indikator kinerja utama program BPNT yang diajukan cocok (fit) untuk menggambarkan variabel pendukungnya.

Selanjutnya, masing-masing indikator perlu diuji signifikansi sumbangannya terhadap ukuran faktor kinerja program BPNT. Visualisasi model konstruk pengukuran indikator kinerja utama program BPNT pada model dasar *Standardized Solution* dengan nilai T sebagai untuk signifikansi per indikator disajikan pada Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Model Dasar *Standardized Solution* dan T-Value Indikator Kinerja Utama BPNT

Hasil pengukuran konstruk indikator kinerja utama program BPNT memberikan bukti, bahwa *key performance indicators* pada program tersebut tersusun atas tujuh

variabel amatan yakni tepat sasaran, jumlah, waktu, kualitas, harga, administrasi dan manfaat. Untuk mengukur reliabilitas dapat digunakan *composit reliability (CR)*

measure atau ukuran reliabilitas komposit. Berdasar hasil analisis nilai CR diperoleh reliabilitas konstruk dengan nilai $\geq 0,70$, ini menunjukkan, bahwa semua manifes *key performance indicators* program bantuan pangan non tunai adalah unidimensi. Terdapat keterkaitan antar variabel di antara ketujuh variabel amatan yang terukur namun dengan nilai yang sangat kecil. Kemudian, untuk menguji intensitas sumbangan/signifikansi variabel amatan terhadap variabel laten ditampilkan dalam bentuk *T-value*. Dari uji ini diketahui semua nilai $t_{hitung} > 1,96$ sehingga sumbangan semua komponen variabel amatan (indikator) dinyatakan signifikan.

Tiga variabel yang memiliki sumbangan tinggi terhadap pengukuran *key performance indicators* program bantuan pangan non tunai adalah tepat kualitas (0,72) tepat administrasi (0,69), dan tepat harga (0,51). Hal ini mengindikasikan bahwa ketercapaian *key performance indicators* program bantuan pangan di Indonesia banyak dibentuk oleh ketiga

variabel tersebut. Komponen ketepatan mutu (kualitas) dan ketepatan harga terkait dengan kualitas atau mutu dan harga beras dan telur yang dibeli penerima manfaat di e-Warong (tempat pencairan BPNT) dengan dana BPNT. Dalam hal ini, penerima bantuan dapat memilih tempat pencairan serta menentukan sendiri beras dan telur yang akan dibeli menurut kebutuhan masing-masing sehingga bahan pangan yang diterima dapat diketahui sendiri kualitas dan harganya.

Di sisi lain, e-Warong sebagai tempat pencairan bantuan pangan juga menjaga kualitas dan harga bahan pangan yang disalurkan untuk meningkatkan kepuasan keluarga penerima manfaat sebagai pelanggan. Selanjutnya terkait dengan komponen tepat administrasi, tingkat nilai sumbangan yang tinggi pada aspek tersebut mengindikasikan pentingnya ketertiban administrasi baik dari segi penyalur (khususnya Bank dan *e-Warong*), misalnya surat perjanjian kerja antara Bank dengan e-Warong, pencatatan bukti transaksi

keluarga penerima manfaat di e-Warong, maupun dari segi data pribadi yang dimiliki keluarga penerima manfaat, misalnya kejelasan nama, alamat, nomor kependudukan, dan lain sebagainya.

Saran atau rekomendasi dari hasil kajian ini ditujukan kepada pemerintah/stakeholder terkait dan peneliti dalam mengembangkan kebijakan, arah program, dan penilaian keberhasilan BPNT hendaknya mempertimbangkan dimensi yang jamak dan menggunakan *key performance indicators* yang komprehensif. Hasil kajian membuktikan bahwa semua variabel 7T yang telah dirumuskan sudah valid serta memiliki kontribusi yang positif dan signifikan dalam membentuk ketercapaian *key performance indicators* program bantuan pangan di Indonesia, meskipun sumbangan pada masing-masing dimensi tidak sama besar.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini terbukti, bahwa konstruk pengukuran kinerja program bantuan pangan di

Indonesia terdiri dari tujuh indikator yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, tertib administrasi, dan tepat manfaat (7T). Kajian ini membuktikan bahwa semua kriteria *goodness of fit* terpenuhi. Kinerja program bantuan pangan dapat diukur menggunakan ketujuh aspek tersebut untuk mengetahui seberapa baik pelaksanaan program bantuan pangan di lapangan. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi program bantuan pangan dapat diketahui dengan melakukan pengukuran indikator kinerja utama yang telah terbukti baik dalam penelitian ini. Lebih lanjut, pembuktian konstruk pengukuran ini sekaligus juga merupakan bentuk validasi instrumen yang kemudian dapat direkomendasikan untuk digunakan pada kegiatan evaluasi program bantuan sosial pangan, terutama program BPNT pada penyelenggaraan berikutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan menyampaikan

terima kasih kepada Ditjen PFM Kementerian Sosial Republik Indonesia yang memberikan dukungan pendanaan, terima kasih juga kepada segenap rekan di B2P3KS Kementerian Sosial Republik Indonesia, serta terima kasih kepada seluruh Pemerintah Daerah dan segenap jajaran serta responden atas partisipasinya sehingga penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Alex Linley, P., Andrews, L., & Joseph, S. (2007). Confirmatory Factor Analysis of the Posttraumatic Growth Inventory. *Journal of Loss and Trauma*, 12(4), 321–332.
<https://doi.org/10.1080/15325020601162823>
- Anonim. (1996). The Rome Declaration on World Food Security. *Population and Development Review*, 22(4), 807.
<https://doi.org/10.2307/2137827>
- B2P3KS, T. P. (2018). *Hasil Evaluasi Efektivitas Program Bansos Rastra dan BPNT pada 50 Kota/Kabupaten Di Indonesia*. Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian RI. (2013). *Laporan Badan Ketahanan Pangan 2013*. 5, 26.
bkpp.pertanian.go.id
- Central Statistics Agency. (2020). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2019*.
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html>
- Chan, V. (2015). Implications of key performance indicator issues in Ontario universities explored. *Journal of Higher Education Policy and Management*, 37(1), 41–51.
<https://doi.org/10.1080/1360080X.2014.991531>
- Conceição, P., Levine, S., Lipton, M., & Warren-Rodríguez, A. (2016). Toward a food secure future: Ensuring food security for sustainable human development in Sub-Saharan Africa.

- Food Policy*, 60, 1–9. <https://doi.org/10.3109/0142159X.2016.11668637>
- <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2016.02.003>
- D.L. Stufflebeam, A. J. S. (1985). *Systematic Evaluation: A Self-Instructional Guide to Theory and Practice (Evaluation in Education and Human Services 1985th Edition by (Author))*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, (2017).
- FAO. (2009). Declaration of the World Summit on Food Security. *World Food Summit, November 2009*, 16–18. www.fao.org
- Ferdinand, A. (2002). *Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen, Edisi ketiga*. Fakultas Ekonomi UNDIP.
- Frye, A. W., & Hemmer, P. A. (2012). Program evaluation models and related theories: AMEE Guide No. 67. *Medical Teacher*, 34(5), e288–e299.
- <https://doi.org/10.3109/0142159X.2016.11668637>
- Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1995). *Multivariate data analysis*. NJ Prentice-Hall.
- HAM, K. (2012). Pangan Dan Nutrisi , Serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan. *Menghentikan, Tujuan Asasi, Hak Dasar, Manusia*, 12, 1–9.
- Hebinck, A., Galli, F., Arcuri, S., Carroll, B., O'Connor, D., & Oostindie, H. (2018). Capturing change in European food assistance practices: a transformative social innovation perspective. *Local Environment*, 23(4), 398–413. <https://doi.org/10.1080/13549839.2017.1423046>
- Ishartono & Raharjo, S. . (2019). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan. *SOCIAL WORK JURNAL*, 6(2), 154–272. <https://www.ingentaconnect.com/content/10.14512/gaia.28.2.1>

- Ivanic, M., & Martin, W. (2008). Implications of higher global food prices for poverty in low-income countries. *Agricultural Economics*, 39(SUPPL. 1), 405–416. <https://doi.org/10.1111/j.1574-0862.2008.00347.x>
- Jöreskog, K. G., and Sörbom, D. (1993). *LISREL 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command language*. Scientific Software International.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai, (2018).
- Kementerian PPN/ Bappenas. (2017). *Terjemahan Tujuan dan Target Global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)*. http://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Buku_Terjemahan_Baku_Tujuan_dan_Target_Global_TPBB.pdf
- Kline, R. B. (2015). *Principles and Practice of Structural Equation Modeling (4th ed.)*. NY: The Guilford Press.
- Kusnendi. (2008). *Model-model Persamaan Struktural*. Alfabeta.
- Lavy, S., & Dixit, M. K. (2017). *Key performance indicators for facility performance assessment: measuring core indicators using building information modeling*. *Proceedings of International Research Conference*. 322–330.
- Lavy, S., Garcia, J. A., Scinto, P., & Dixit, M. K. (2014). Key performance indicators for facility performance assessment: simulation of core indicators. *Construction Management and Economics*, 32(12), 1183–1204. <https://doi.org/10.1080/01446193.2014.970208>
- Levine, T. R. (2005). Confirmatory Factor Analysis and Scale Validation in Communication Research. *Communication Research Reports*,

- 22(4), 335–338.
<https://doi.org/10.1080/00036810500317730>
- Lewis, T. F. (2017). Evidence Regarding the Internal Structure: Confirmatory Factor Analysis. *Measurement and Evaluation in Counseling and Development*, 50(4), 239–247.
<https://doi.org/10.1080/07481756.2017.1336929>
- Mardisantosa, Bambang; Huri, Daman; Edmaningsih, Y. (2018). Faktor-faktor Kejadian Kurang Energi Protein (KEP) Pada Anak Balita. *Jurnal Kesehatan*, 6(2).
<https://doi.org/10.37048/kesehatan.v6i3.14>
- Opperman, E. A., Benson, L. E., & Milhausen, R. R. (2013). Confirmatory Factor Analysis of the Female Sexual Function Index. *Journal of Sex Research*, 50(1), 29–36.
<https://doi.org/10.1080/00224499.2011.628423>
- Palmer, D., & Groppo, P. (2002). Food Insecurity in the World 2002. *FAO Report*.
- PMK. (2019). *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*. Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Sanders; Jody L. Fitzpatrick; James R.; Blaine R. Worthen. (2011). *Program Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines, 4th Edition*.
- Sedgwick, P. (2015). Multistage sampling. *BMJ (Online)*, 351(August).
<https://doi.org/10.1136/bmj.h4155>
- Stake, R. E. (1967). The Countenance of Educational Evaluation. *Teachers College Record*, 68, 523–540.
- The Central Statistic Agency. (2020). *Indonesia's Poverty Profile September 19*.
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html>
- Waity, J. F. (2019). Geographic variation in

barriers to the usage of food assistance
in Indiana. *Journal of Hunger &
Environmental Nutrition*, 14(4), 511–
525.

<https://doi.org/10.1080/19320248.2018.1434100>

Worthen, B. R., & Sanders, J. R. (1987).

*Educational evaluation: Alternative
approaches and practical guidelines.*
Longman.

Zhou, A. C., & Hendriks, S. L. (2017).

Does Food Assistance Improve
Recipients' Dietary Diversity and Food
Quality in Mozambique? *Agrekon*,
56(3),248–262.

<https://doi.org/10.1080/03031853.2017.1360783>